



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	05 Januari 2024	Media	Haluan
Kategori	PARIWISATA & BUDAYA	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Desa Wisata Peraih ADWI 2021 di Pariaman Terancam Ditutup

PARIAMAN, HALUAN—Pengelolaan Desa Wisata Apar di Kota Pariaman harus terhenti pada Agustus 2023 lalu karena masalah internal antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selaku pengelola dengan masyarakat setempat.

Ketua BUMDes Apar Mandiri, Muhammad Fadel beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya mendapat penolakan sejak pertama mengemban tugas untuk mengelola area wisata itu. "Ada penolakan dari masyarakat terhadap BUMDes. Mereka mengeluh kenapa BUMDes yang mengelola, padahal kami (masyarakat) dari dulu," ujarnya, beberapa waktu yang lalu.

Ia menjelaskan, BUMDes mulai mengelola Desa Wisata Apar sejak tahun 2019 dan harus vakum pada 2020 karena masalah tersebut. Kendati begitu, pada tahun yang sama, area wisata yang terkenal dengan hutan mangrove dan pantainya itu aktif kembali dengan perubahan besar.

"Saat itu, wisata Apar vakum selama delapan bulan. Namun, bulan Agustus, Pak Marhen (Kapala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariaman, red) datang ke desa dan menemui pemuka masyarakat, sehingga wisata Apar berjalan kembali meski penolakan masih tetap ada," ujarnya.

Fadel menyebut, pada tahun yang sama Desa Wisata Apar berhasil mendapat suntikan dana pembangunan sarana prasarana sebanyak Rp1,06 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membangun gazebo dan jembatan sepanjang 100 meter sebagai jalan masuk ke wilayah hutan mangrove.

Menanggapi penolakan pemuda setempat atas kehadiran BUMDes sebagai pengelola Desa Wisata Apar, Fadel mengatakan bahwa pihaknya sudah memastikan permasalahan tersebut melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ia khawatir, jika penolakan yang timbul karena masalah kepemilikan tanah ulayat yang memiliki pewaris.

"Jawaban dari pihak KAN bahwa tanah itu milik nagari dan BUMDes boleh mengelolanya. Selagi digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, aman," ujarnya.

Setelah memastikan status tanah area Desa Wisata Apar dan menyelesaikan program pembangunan jembatan, Fadel merasa bisa bernapas lega. Pada Maret tahun 2021, destinasi wisata tersebut dibuka dengan pengelolaan yang lebih baru.

"Kami mulai menjalankan pungutan retribusi, dengan hitungan tiket masuk Rp3000 per orang. Begitu juga dengan pengadaan petugas kebersihan yang sebelumnya dikerjakan BUMDes langsung," tuturnya.

Ia menerangkan, pada tahun itu, Desa Wisata Apar berhasil memperoleh pendapatan Rp100 juta dari pungutan tiket masuk. Dana tersebut, sebanyak sepuluh persen disetor kepada pemerintah kota dalam bentuk pajak. "Selain membayar pajak, uang tersebut juga digunakan untuk perawatan kawasan dan gaji petugas kebersihan serta petugas tiket," ucapnya.

Fadel dengan bangga mengatakan, sejauh ini kawasan Desa Wisata itu telah disam-

KLIPING KORAN

HARI : Senin

TANGGAL : 05 Januari 2024

21

